



## Tata Kelola Kolaboratif Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kota Padang

Geraldine Dwitiya Putri Kirana<sup>1</sup>, M. Fachri Adnan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

E-mail: <sup>1</sup>[geraldinegeral20@gmail.com](mailto:geraldinegeral20@gmail.com), <sup>2</sup>[fachriadnan@fis.unp.ac.id](mailto:fachriadnan@fis.unp.ac.id)

### ARTICLE HISTORY

Received 08 November 2022]  
Revised [29 November 2022]  
Accepted [14 Desember 2022]

### KEYWORDS

Collaborative, Handling, Covid-19  
Pandemic

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Penanganan permasalahan covid-19 di Kota Padang belum maksimal. Hal ini disebabkan kurangnya kerjasama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, swasta hingga masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi prinsip tata kelola kolaboratif, dan untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi implementasi tata kelola kolaboratif dalam penanganan pandemi covid-19 di Kota Padang. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Dalam menentukan informan digunakan teknik purposive sampling. Dalam penelitian ini, wawancara dan studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik manual data analysis procedure (MDAP). Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber. Hasil pada penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola kolaboratif dalam penanganan pandemi covid-19 di Kota Padang belum berjalan dengan semestinya. Hal itu dilihat dari beberapa prinsip yang sudah terlaksana dengan baik dan juga ada prinsip yang belum terlaksana dengan baik. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan collaborative governance yaitu faktor budaya dan faktor politik.

### ABSTRACT

The handling of the Covid-19 problem in the city of Padang has not been maximized. This is due to the lack of cooperation from various parties, from the government, private sector to the community. This study aims to explain the implementation of collaborative governance principles, and to explain the factors that influence the implementation of collaborative governance in handling the COVID-19 pandemic in Padang City. The research uses qualitative methods. In determining the informants used purposive sampling technique. In this study, interviews and documentation studies were used to obtain data. Data analysis was performed using manual data analysis procedure (MDAP) techniques. The validity of the data was tested by triangulation of sources. The results of the study indicate that the implementation of collaborative governance in handling the COVID-19 pandemic in the city of Padang has not been running properly. This can be seen from several principles that have been implemented well and there are also principles that have not been implemented properly. Factors that influence the implementation of collaborative governance are cultural factors and political factors.

## PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 menjadi salah satu periode yang berat bagi seluruh negara yang mengalaminya, termasuk Indonesia. Indonesia kemudian dipandang sebagai negara yang lambat merespon pandemi covid-19 (Aeni, 2021). Pandemi berdampak pada seluruh aspek kehidupan, dalam halnya penerapan PSBB di tahun 2020, kemudian berlanjut dengan PPKM berlevel, dimana dengan adanya penerapan tersebut seluruh kegiatan masyarakat dilakukan terbatas, sehingga hal itu berdampak ke kehidupan masyarakat banyak. Mulai dari aktivitas kerja, sistem pembelajaran yang biasanya dilakukan dengan tatap muka setelah itu dialihkan ke media daring.

Kota Padang menjadi salah satu daerah di Sumatera Barat yang memiliki tingkat kasus covid-19 yang tinggi hal itu dilihat dari meningkatnya kasus perbulan, mulai dari bulan Maret terdapat 6 kasus, April terdapat 93 kasus, Mei terdapat 285 kasus sampai bulan seterusnya (Dinas Kesehatan Kota Padang). Penanganan covid-19 di Kota Padang pada tahun 2020-2022 belum cukup bisa dilaksanakan dengan baik, karena masih kurangnya kerjasama berbagai pihak, dalam mencapai penanganan pandemi dengan baik. Masalah penanganan pandemi seharusnya tidak diselesaikan sendiri oleh pemerintah, karena dibutuhkan kerjasama oleh seluruh pihak dalam mengatasi permasalahan ini. Menurut Bila dan Saputra (2019) bahwa hubungan antar aktor tidak hanya satu arah melainkan timbal balik.

Masalah yang terjadi dalam penanganan pandemi yaitu pertama, kekurangsiapan pemerintah dalam penerapan PSBB hal itu dilihat bahwa Wali Kota Padang Mahyeldi meminta Menteri saling bersinergi agar PSBB dapat terlaksana dengan maksimal dan memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan cepat, tetapi yang terjadi masalah PSBB tidak usai karena di pusat juga tidak kompak (Kompas, 2020a). Kedua, kurang sadarnya masyarakat untuk bisa mematuhi aturan protokol kesehatan serta tidak mendisiplinkan diri dalam menerapkannya seperti dalam menggunakan masker, rutin mencuci tangan serta menjaga jarak, hal itu masih belum bisa dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat

termasuk Kota Padang, dapat dilihat dalam rekaman video di sebuah rumah makan di Kota Padang, seorang ibu membahas protokol kesehatan covid-19 dalam video tersebut mengatakan bahwa Padang Kota bebas, padang aman dan tidak takut sama corona, kemudian dia mengatakan disini ramai dan juga tidak ada jaga jarak (Kompas, 2021). Dilihat dari tidak disiplinnya masyarakat Kota Padang yaitu sebanyak 49 warga Kota Padang dikenai sanksi bakti sosial, karena tidak menggunakan masker saat beraktivitas diluar rumah (Kompas, 2020b). Terakhir masih kurangnya kerjasama swasta dalam menangani pandemi covid-19.

Dalam rangka untuk mempercepat penanganan pandemi maka diperlukan konsep tata kelola kolaboratif yang didefinisikan sebagai sebuah proses kolaboratif yang terdapat keterlibatan pemerintah maupun organisasi non pemerintah yang masing-masing memiliki kepentingan dalam membuat kebijakan untuk dapat mencapai tujuan. Rahu (2021) mendefinisikan kolaborasi sebagai suatu proses dimana pihak-pihak yang terlibat melihat suatu masalah dari sudut pandang atau aspek yang berbeda yang menyatukan perbedaan serta mencari solusi dan sebagai hubungan yang saling menguntungkan antara dua pihak atau lebih yang bekerjasama dan bertanggungjawab untuk mencapai tujuan.

Keterlibatan organisasi non-pemerintah dalam tata kelola pemerintahan akan memberikan kontribusi baik sisi anggaran maupun sisi inovasi. Dalam penanganan pandemi covid di Kota Padang yang dilibatkan bukan hanya pemerintah, namun ini harus dilakukan bersama-sama. Pandemi ini bukan hanya masalah nasional melainkan global, maka dari itu pemerintah Kota Padang menghimbau kepada semua pihak untuk bersama-sama memerangi virus ini. Tata kelola pemerintahan kolaboratif Menurut Alfiandri, Akbar, Ikhsan (2019) yaitu wujud publik dan swasta yang bekerja sama dengan melaksanakan cara-cara berupa teknis maupun khusus.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan implementasi prinsip tata kelola kolaboratif dalam penanganan pandemi covid-19, dan untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi implementasi tata kelola kolaboratif dalam penanganan pandemi covid-19.

## LANDASAN TEORI

### ***Collaborative governance***

Menurut Ansel dan Gash tata kelola kolaboratif adalah bentuk pemerintahan di mana satu atau lebih Lembaga publik melibatkan pemangku kepentingan non pemerintah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan bersama dan bersifat formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif dalam pendekatan mereka untuk merumuskan atau menempatkan kebijakan publik menjadi tindakan atau mengawasi aset atau program publik (Riyanta & Kurniati, 2018).

Menurut Alfiandri, Akbar, Ikhsan (2019) konsep pemerintahan kolaboratif adalah bentuk pemerintah di mana entitas publik dan swasta berkolaborasi melalui cara khusus atau teknis, terutama dengan menetapkan peraturan dan aturan hukum untuk penyediaan barang dan jasa publik. Definisi ini mengidentifikasi peran yang berbeda untuk lembaga publik, meskipun faktanya banyak bentuk kolaborasi melibatkan entitas non-publik. Selain itu, tata kelola kolaboratif tidak pernah ada hanya atas dasar konsultatif. Sebaliknya, kolaborasi menyiratkan komunikasi dan pengaruh dari dua arah atau lebih, dan tata kelola kolaboratif menetapkan standar untuk jenis partisipasi pemangku kepentingan non publik. Penyatuan lembaga publik dan pemangku kepentingan non pemerintah dalam pengambilan keputusan melalui konsensus dan partisipasi adalah definisi lain dari tata kelola kolaboratif menurut (Kurniadi, 2020).

Dapat disimpulkan bahwa pemerintahan kolaboratif adalah proses kolaboratif di mana aktor negara dan aktor non negara berpartisipasi, masing-masing dengan kepentingannya sendiri dalam proses pembuatan kebijakan dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu.

### ***Prinsip collaborative governance***

Berikut lima prinsip kerjasama yang dapat dijadikan indikator dalam penelitian ini (Fitriana,2018):

#### 1.) Partisipasi

Artinya semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan pendapatnya, dapat mengambil keputusan tentang nasibnya sendiri, dan bertanggung jawab atas semua keputusan yang telah disepakati bersama. Partisipasi harus tepat waktu agar sinkronisasi dapat berlangsung karena itu harus dilakukan tepat waktu atau dengan momentum yang tepat.

#### 2.) Akseptasi

Para pihak yang bekerjasama harus berdasarkan akseptasi, artinya masing-masing pihak harus menerima kehadiran pihak lain secara utuh dan atas dasar yang setara, bertanggungjawab. Salah satu cara untuk mendapatkan penerimaan dari orang lain atas keberadaan seseorang adalah dengan mengadopsi pola pikir tanggungjawab. Kemudian jika salah satu pihak yang bekerja sama tidak dapat



bertanggungjawab untuk menjalankan tugasnya, mereka harus setuju untuk digantikan oleh pihak yang lebih bertanggungjawab

### 3.) Komunikasi

Aspek terpenting dari kolaborasi adalah komunikasi karena, kolaborasi tidak dapat terjadi tanpa komunikasi. Hanya melalui komunikasi dapat diberikan ide, informasi, berita, dan saran. Masing-masing pihak harus mau dan mampu mengkomunikasikan rencana kerjanya. Akibatnya masing pihak harus mau bersatu atau berkolaborasi sebagai satu kesatuan.

### 4.) Percaya

Masing-masing pihak harus bisa saling percaya, dan dipercaya, karena tidak mungkin hubungan kerjasama yang intim diatas kecurigaan. Oleh karena itu, masing pihak perlu berani terbuka dan transparan. Dimana kepercayaan publik kepada pemerintah menentukan keberhasilan penerapan prinsip-prinsip tata kelola kolaboratif dalam pemerintahan.

### 5.) Berbagi

Aktivitas dan sumber daya digabungkan dan dibagi di antar pihak-pihak yang bekerja menuju tujuan bersama dalam kerjasama kolaboratif, serta mendiskusikan keuntungan dan kerugian dari kerjasama tersebut, baik manfaat maupun resiko yang mungkin timbul dari bekerja sama secara kolaboratif. Untuk mencapai tujuan bersama, setiap orang harus dapat membagi diri, harta, dan pekerjaan yang dilakukannya, dari pada hanya mengandalkan satu pihak untuk mengorbankan atau memberikan segalanya sehingga keadaan tidak lagi proporsional. Prinsip ini juga mengandung makna penyerahan, artinya masing-masing pihak bersedia memberi sekaligus menerima pendapat orang lain termasuk di kritik.

## **Faktor yang mempengaruhi collaborative governance**

Standar dalam tata kelola kolaboratif yang dapat menjadi panduan untuk menentukan praktik tata kelola kolaboratif akan berhasil dilaksanakan atau tidak. Kolaborasi dan partisipasi terhambat oleh sejumlah faktor antara lain, government of Canada dalam Astuti (2020) :

### 1.) Faktor Budaya

Kecenderungan budaya untuk bergantung pada proses dan keengganan untuk mengambil resiko dan terobosan dapat menyebabkan sebuah kolaborasi gagal. Kolaborasi kemudian gagal sebab akibat dari dominasi pemerintah yang terus berlanjut dan kegagalan untuk mengimplementasikan kesepakatan berdasarkan pola pikir kooperatif dan egaliter, yang diperlukan agar suatu kerjasama dapat berhasil. Selain itu pemerintah terus menggunakan pendekatan top-down ketika berkolaborasi dengan pihak lain. Kolaborasi juga gagal karena partisipasi kelompok kepentingan sering dianggap sekunder, tidak relevan, dan didominasi oleh kelompok dominan atau pemerintah secara top down.

### 2.) Faktor Politik

Dalam hal mencapai tujuan politik yang kompleks dan kontradiktif, kurangnya kreativitas pemimpin dapat menyebabkan kegagalan kolaborasi. Jika pemimpin kelompok yang bekerja sama kurang kreatif atau tidak cukup inovatif, akan sulit untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan politik. Perubahan kesepakatan dan perbedaan pemangku kepentingan adalah dua faktor tambahan yang dapat menyebabkan kegagalan kerjasama. Kolaborasi bisa gagal sebab ada perubahan kesepakatan yang dibuat pada awal perjanjian kerjasama dan muncul kepentingan baru yang berbeda diantara para pemangku kepentingan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan dan memahami kejadian, fenomena, interaksi sosial, sikap, dan pemikiran, baik yang terjadi secara individu maupun kelompok. Penelitian dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Padang, BPBD Kota Padang, PT. Semen Padang, RSUD dr Rasidin Padang, dan Semen Padang Hospital. *Purposive sampling* digunakan untuk menentukan informan penelitian. Wawancara dan studi dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber dalam uji keabsahan data. Dalam analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik *manual data analysis procedure* (MDAP).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolaborasi dibutuhkan dalam mencapai tujuan penanganan pandemi covid-19 di Kota Padang. Diperlukan kerjasama dari pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Peran berbagai pihak tidak hanya sebagai objek melainkan juga sebagai subjek dalam penanganan pandemi covid-19. Dibutuhkan arahan dan landasan berupa prinsip-prinsip supaya pihak yang terlibat memahami peran dan tanggungjawabnya hal itu dilakukan dalam memulai sebuah kerjasama. Hal itu dapat dilihat dari beberapa prinsip kolaborasi sebagai berikut:

### Partisipasi (*Participation*)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa Pemerintah Kota Padang ikut berperan dalam penanganan covid-19, dilihat dari partisipasi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan berupa surat edaran PSBB dan PPKM. Selain itu pemerintah juga membuat satgas penanganan covid-19 yang sudah dikeluarkan oleh Walikota Padang. Berdasarkan SK tersebut masing-masing pihak mengetahui tugasnya, sebab didalamnya terdapat pembagian kedudukan serta tugas masing-masing. Hal tersebut sesuai dengan teori partisipasi menurut Fitriana (2018) bahwa semua pihak memiliki kesempatan untuk menyatakan pendapat serta bertanggungjawab atas keputusan yang telah disepakati.

Pihak BPBD juga berpartisipasi dan turun langsung kelapangan serta melibatkan LSM kebencanaan dengan memberikan sosialisasi ke masyarakat. Selain itu Dinas Kesehatan Kota Padang juga menyediakan tempat karantina bagi pasien yang terkena covid, dan dalam mendukung percepatannya dinas kesehatan membuat gugus tugas untuk penanganannya. Selain itu RS Pemerintah dan Swasta ikut terlibat dalam menangani pasien yang terpapar covid-19. Menurut Adnan dkk (2021) bahwa konsep partisipasi ditafsirkan cukup luas yaitu untuk mencakup pidato politik serta transmisi internet pengetahuan politik, kemudian sangat penting untuk menggunakan konsep partisipasi yang lebih dari sekedar mengacu pada perilaku pemilih langsung dalam hal partisipasi.

Dalam mendukung penanganannya pihak kelurahan bekerjasama dengan aparat kelurahan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di tempat keramaian, tempat ibadah, sekolah dan lainnya. Selain organisasi perangkat daerah pihak swasta juga ikut aktif berpartisipasi dalam memberikan bantuan-bantuan untuk menangani pandemi. Hal itu sesuai dengan teori *collaborative governance* menurut Kurniadi (2020) yang dimaknai bersatunya lembaga publik dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan melalui partisipasi dan konsensus. Unit CSR PT. Semen Padang ikut memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena covid mulai dari pembagian masker hingga sembako. Hal tersebut sesuai dengan teori kolaborasi Ansell dan Gash dalam Riyanta dan Kurniati (2018) bahwa tata kelola kolaboratif yaitu lembaga publik yang melibatkan organisasi non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk menyusun atau mengimplementasikan kebijakan publik.

### Akseptasi (*Acceptable*)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa semua pihak yang terlibat sudah menjalankan tugas dan tanggungjawab yang sudah diberikan. Hal itu sesuai dengan teori akseptasi menurut Fitriana (2018) tiap pihak yang berkolaborasi dituntut untuk bersikap tanggungjawab atau dapat diandalkan.

Pihak yang berkolaborasi bertanggungjawab dengan tugas yang sudah diberikan kepadanya diakui Juliustin (wawancara, 12 Oktober 2022) sebagai berikut : dengan adanya SK satgas aturan utamanya sudah ada dan jelas sehingga masing-masing perangkat daerah paham akan tugas dan tanggungjawabnya, misalnya dalam pemakaman pasien covid yang ikut terlibat didalamnya dinas kesehatan serta dinas lingkungan hidup yang menhandel untuk pemakamannya, serta pihak BPBD juga ikut handel disitu.

Dalam penanganan pandemi dibentuk tim satgas mulai dari tingkat kota, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan hingga tingkat RT/RW. Keanggotaan dari tim tersebut diisi oleh stakeholder berkepentingan di dalamnya. Pihak yang terlibat melaksanakan tugas sesuai SK yang dikeluarkan Walikota Padang Nomor 379 tahun 2020. Dalam SK sudah terdapat pembagian kedudukan dan tugas masing-masing pihak. Hal tersebut sesuai dengan teori kolaborasi menurut Kurniadi (2020) bahwa kolaborasi dalam tata kelola memerlukan tanggungjawab bersama dari semua pihak yang terlibat.

### Komunikasi (*Communication*)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa pemerintah, swasta, dan tokoh masyarakat di Kota Padang telah melaksanakan komunikasi dengan baik. Dalam melakukan komunikasi pihak pemerintah memberikan informasi terkait perkembangan kasus covid-19 melalui web dari dinas kesehatan. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat dapat mengetahui jumlah



perkembangan kasus perharinya. Dalam konsep komunikasi menurut Rengkung, Tampi dan Londa (2021) adalah proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau bertukar informasi sehingga terjadi terjadi saling pengertian yang mendalam.

Komunikasi juga dilakukan melalui media sosial berupa Instagram dari pusdalops bpbd kota padang. Komunikasi yang dilakukan dengan media tersebut, agar masyarakat mendapatkan berita dan info terkait pandemi covid. Dalam melakukan komunikasi antar stakeholder yang terlibat digunakan whatsapp group, setiap informasi terkait covid seluruhnya disampaikan dalam whatsapp grup.

Menurut teori *collaborative governance* Nasrulhaq (2020) bahwa dalam menjalankan kerjasama setidaknya mengikutsertakan minimal tiga pihak yaitu pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat dan dampak dari penguatan interaksi dalam bentuk kerjasama yaitu terjalannya pesan dari satu komunikasi ke komunikasi lain. Dalam penanganan pandemi pihak swasta juga ikut berperan aktif dalam menyampaikan informasi berupa sosialisasi yang disampaikan melalui baliho, leaflet, radio serta melakukan kegiatan webinar yang dilakukan setiap bulan. Hal ini sesuai dengan teori komunikasi menurut Akbar (2021) yang menyatakan bahwa komunikasi dalam sebuah kelompok digunakan untuk mengirimkan dan menerima informasi yang dapat mempengaruhi orang lain.

### **Percaya (Trust)**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa masyarakat Kota Padang belum sepenuhnya percaya kepada pemerintah. Dalam penanganannya pemerintah sudah melakukan berbagai cara agar masyarakat dapat mematuhi aturan yang berlaku. Tetapi hal tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat, untuk membangun kepercayaan masyarakat pemerintah gencar melaksanakan sosialisasi terkait covid-19 mulai dari menerapkan protokol kesehatan, mensosialisasikan PHBS, serta dalam melaksanakan vaksinasi. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kairoot dan Ersya (2021) bahwa kepercayaan masyarakat dalam melaksanakan dan mematuhi kebijakan penanganan covid-19 masih rendah, dimana kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kebijakan yang dikeluarkan berhubungan dengan keterlibatan masyarakat dalam menaati pemerintah.

Selama pandemi covid-19, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah karena sejak awal masyarakat menganggap kebijakan tersebut tidak konsisten (Prasetyo dan Kriswibowo, 2022). Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang sulit diterapkan dan memerlukan waktu yang lama. Menurut teori kepercayaan Alfiandri (2019) membangun kepercayaan membutuhkan waktu dan membutuhkan komitmen jangka panjang untuk mencapai kerjasama dalam mencapai hasil yang diinginkan.

### **Berbagi (Share)**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa Kota Padang dalam kegiatan berbagi (*share*) sudah dilaksanakan baik oleh berbagai pihak. Hal ini dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi. Sesuai dengan teori *collaborative governance* Alfiandri (2019) dan Kurniadi (2020) bahwa *collaborative governance* akan berhasil jika ada dialog murni yang memungkinkan semua pihak untuk bersuara, berdiskusi atas kepentingan bersama, kemudian juga berpikiran terbuka, menyadari posisi masing-masing dan ingin mencari solusi.

Dalam rapat tersebut masing-masing pihak menyampaikan hasil kerja yang sudah dilaksanakannya di lapangan, seperti dalam menyampaikan pasien yang dari pelaku perjalanan dari luar, pasien yang terpapar, dirawat hingga meninggal, kemudian juga disampaikan program-program yang sudah dan akan dijalankan kedepannya, serta sosialisasi yang sudah dilakukan selama dilapangan. Hal tersebut sesuai dengan teori berbagi (*share*) menurut Fitriana (2018) artinya masing-masing pihak harus mampu membagikan diri dan miliknya (waktu, sumber daya, dan keterampilan) hal itu sudah dilakukan oleh pihak yang terlibat di dalam penanganan pandemi.

Dalam kerjasama yang dilakukan antar pihak terdapat kriteria yang bisa menjadi tolak ukur dari keberhasilan dan gagalnya dalam proses implementasi *collaborative governance*. Beberapa faktor yang mempengaruhi terhambatnya partisipasi dan kerjasama, antara lain (Astuti dkk, 2020):

### **Faktor budaya**

Dilihat dari faktor budaya, bahwa faktor budaya mempengaruhi penanganan pandemi hal itu terlihat dari banyaknya masyarakat yang menganut paham antivac sehingga pelaksanaan vaksinasi di Kota Padang terjadi keterlambatan. Masyarakat yang tidak percaya vaksin disebabkan kurangnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat terkait vaksin tersebut. Selain itu juga banyak isu, dan informasi yang tidak jelas beredar melalui media sosial dan hal itu yang menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin covid-19 semakin rendah.

Pandemi covid tidak hanya mengancam secara personal melainkan juga mengancam kelompok, komunitas dan masyarakat secara keseluruhan, jadi salah satu dari sejumlah orang menolak untuk divaksin, maka akan membahayakan orang lain. Hal itu sesuai dengan teori faktor budaya menurut Astuti dkk (2020) bahwa sebuah kolaborasi bisa gagal sebab partisipasi dari kelompok kepentingan seringkali memandang bukan hal yang utama dan tidak diperlukan.

Kemudian juga terlihat dari perubahan cara belajar-mengajar di Kota Padang, yang sebelumnya dilakukan secara langsung atau tatap muka setelah itu disampaikan secara online menggunakan berbagai platform media sosial seperti email, whatsapp, dan aplikasi yang berhubungan dengan pendidikan, hal ini yang sulit dilakukan sewaktu pandemi, karena biasanya siswa bertemu langsung dengan murid dan semenjak pandemi hal itu diubah, dan itu berdampak ke seluruh siswa salah satunya siswa Sekolah Dasar, karena siswa belum bisa menggunakan media tersebut maka diminta untuk orang tua yang membimbing anaknya mengajar dengan materi-materi yang diberikan guru melalui media tersebut. Tetapi banyak orang tua yang kesulitan dalam menggunakan media tersebut, terutama orang tua yang belum bisa menggunakan hp sehingga butuh waktu yang lama untuk mempelajari cara menggunakan media tersebut. Tetapi perlahan seiring berjalan waktu hal tersebut bisa dilakukan, tetapi memerlukan waktu yang lama. Sesuai dengan teori budaya menurut Ranjabar dalam Yanuarita dan Haryati (2021) bahwa budaya atau juga sebagai kultur, adalah mentalitas keberadaan manusia dalam hubungan yang saling melengkapi dengan alam, lingkungan hidup, yang didalamnya semua hasil tergabung baik dilihat secara konsep fisik berupa materil maupun psikologis dan spiritual.

### **Faktor Politik**

Dilihat dari faktor politik, bahwa faktor politik mempengaruhi penanganan pandemi hal itu dilihat dari masing-masing pihak yang berkolaborasi memberikan inovasi yaitu membuat wadah yang diberi nama kongsi covid. Inovasi ini dilakukan karena melihat masyarakat Kota Padang jiwa kegontoroyongannya sangat luar biasa. Maka dari itu pemerintah membuat inovasi ini untuk masyarakat yang terpapar covid, bantuan diberikan oleh masyarakat setempat.

Selain itu dinas kesehatan juga membuat inovasi berupa kelurahan siaga covid, inovasi tersebut dilakukan percobaan untuk satu kelurahan. Kemudian dilihat inovasi dari pihak RSUD dr. Rasidin Padang, membuat inovasi bagi pasien yang terpapar covid berupa terapi yang dikombinasikan dengan spiritual. Jadi inovasi yang dilakukan oleh berbagai pihak berjalan dengan baik. Sama halnya dengan teori faktor politik menurut Astuti dkk (2020) bahwa kepemimpinan inovatif yaitu pemimpin yang mampu memperkenalkan berbagai nilai dan tujuan yang dapat menjadi landasan tata kelola kolaboratif dan memberikan inspirasi terhadap agenda yang telah ditetapkan dan bisa mengarahkan pada pencapaian hasil yang positif.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa pelaksanaan tata kelola kolaboratif dalam penanganan pandemi covid-19 di Kota Padang belum maksimal, hal itu dilihat dari beberapa prinsip yang sudah terlaksana dengan baik dan juga ada prinsip yang belum terlaksana dengan baik. Prinsip kolaborasi yang sudah dilaksanakan dengan baik yaitu partisipasi, akseptasi, komunikasi, dan berbagi. Kemudian ada satu prinsip yang belum terlaksana dengan baik, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam penanganan pandemi covid-19 di Kota Padang terdapat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan collaborative governance yaitu faktor budaya dan politik, kedua faktor tersebut mempengaruhi dalam pelaksanaan penanganan covid.

### **Saran**

Dalam mencapai penanganan pandemi maka diperlukan peningkatan dana yang difokuskan dalam penanganan pandemi covid, dan perlu diadakan kegiatan-kegiatan yang dapat membangun kepercayaan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adnan, M. Fachri., Dalle, Juhriyansyah., Malau, Hasbullah., Yvanka, Vika. 2021. The Influence of social media and Public Policy on Public Political Participation in Handling COVID-19 Pandemic: A Study from Indonesian Domestic and Overseas Youngsters' Perspective. *Croatian International Relations Review*. XXVII (87) 2021, 133-159.



- Aeni, Nurul. 2021. Pandemi Covid-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*.
- Akbar Syarifuddin. 2021. Media Komunikasi dalam Mendukung Penyebarluasan Informasi Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*. 2 (1), 73-81.
- Alfiandri, Akbar,D., & Ikhsan, K. 2019. *Collaborative Governance : Suatu Konsep Penguatan Kelembagaan dalam Dunia Investasi*. Tanjung Pinang: Umrah Press.
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Abd. Rachim. 2020. *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
- Bila, A., & Saputra, B. 2019. Strategi Collaborative Governance dalam Pemerintahan. *Jurnal Transformasi Administrasi*. 9 (2), 196-210.
- Fitriana, B.M. 2018. Kolaborasi dalam Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2016-2017. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*. 5 (II Juli), 1-17.
- Dinas Kesehatan Kota Padang. 2022. Kasus Kejadian Penyakit Covid-19 Tahun 2020 S/D 2021 Di Kota Padang.
- Kairoot, Ridhatul., Ersya, Muhammad Prima. 2021. Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Kecamatan Kubung. *Journal of Civic Education*. Vol. 4, No. 4.
- Kompas. 2020a, May 6. Wali Kota Padang minta Menteri Kompak Soal PSBB.
- Kompas. 2020b, September 24. Warga Padang yang Tak Patuh Pakai Masker Kebanyakan Pemotor dan Pengguna Angkot.
- Kompas. 2021, July 4. Sebut Pemerintah Zalim, ibu-ibu di video viral Pengunjung Resto Tak Patuh Prokes diburu Polisi.
- Kurniadi. 2020. *Collaborative Governance dalam penyediaan infrastruktur*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV. Budi Utama.
- Kurniawan, R.P., Giffary, M.A., & Marbun, W. 2021. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Garut. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*. 3 (2), 99-105.
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. 2021. Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praijing di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*. 6 (2), 140-148.
- Nasrulhaq. 2020. Nilai Dasar *Collaborative Governance* Dalam Studi Kebijakan Publik. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*. 6 (3), 395-402.
- Prasetyo, Khusnul., Kriswibowo, Arimurti. 2022. *Public Trust* Pada Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Governansi*. Vol. 8, No 1.
- Rahu, P.D. 2021. Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan Desa Wisata Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*. 10 (1), 13-24.
- Ran, B., & Qi, H. 2018. The Entangled Twins: Power and Trust in Collaborative Governance. *Administration and Society*. 1-30
- Rengkung, Cristian I.R., Tampi, Gustaaf B., Londa, Very Y. 2021. Komunikasi Publik Pemerintah Kota Manado dalam Penanganan Covid-19. *Jurnal Administrasi Publik*. 7 (102).
- Riyanta, S., & Kurniati, P.N. 2018. Strategi Tata Kelola Kolaboratif Antara Aktor Pemerintah dan Non Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Analis Kebijakan*. 2 (2), 24-38.
- Silayar, K., Sartika, I., & Mulyati, D. 2021. Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sula. *Jurnal Renaissance*. 6 (2), 859-874.
- Surat Edaran Wali Kota Padang Nomor 400.599/BPBD-Pdg/VII/2021 Tentang Pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pencegahan Pandemi Covid-19.
- Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 379 Tahun 2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.
- Yanuarita, Heylen Amildha., Haryati, Sri. 2021. Pengaruh Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Budaya di Kota Malang dan Konsep Strategis Dalam Penanganannya. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*. 2 (2) 58-71.